

Analisis Penyusunan Anggaran Pada Kantor Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Lestari¹, Rina Andriani², Diskhamarzaweny³

¹⁻³Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau, Indonesia

Email Corresponding: lestaritelpa@gmail.com

Article History

Received: 17-07-2024

Revision: 18-01-2024

Accepted: 25-01-2024

Published: 31-01-2024

Abstract. This study aims to analyze the process of preparing and implementing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) at the Pangean Sub-District Office, Kuantan Singingi Regency, based on the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 77 of 2020. The findings reveal that the APBD preparation process complies with the applicable guidelines, involving a well-prepared three-month planning phase, engagement of relevant stakeholders in Musrenbang, and annual evaluations of budget realization. The Pangean Sub-District Office applies principles of effectiveness, efficiency, and consideration of community needs in budget planning. Budget implementation is considered efficient, with program and activity achievements reaching 90–95% annually. However, enhanced community participation and optimized technology are needed to support better budget management. With the recommendations provided, it is hoped that the Pangean Sub-District Office can improve the quality of APBD preparation and implementation in the future.

Keywords: APBD, Permendagri Number 77 of 2020, Musrenbang, Budget Efficiency, Budget Evaluation

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kantor Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan APBD telah sesuai dengan pedoman yang berlaku, melibatkan persiapan yang matang selama tiga bulan, pelibatan pihak terkait dalam Musrenbang, serta evaluasi tahunan terhadap realisasi anggaran. Kantor Camat Pangean menggunakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam perencanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran dinilai cukup efisien, dengan capaian program dan kegiatan mencapai 90–95% setiap tahunnya. Namun, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dan optimalisasi teknologi untuk mendukung pengelolaan anggaran yang lebih baik. Dengan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Kantor Camat Pangean dapat meningkatkan kualitas penyusunan dan pelaksanaan APBD ke depannya.

Kata Kunci: APBD, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Musrenbang, Efisiensi Anggaran, Evaluasi Anggaran

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara memiliki peran sentral dalam menyediakan layanan publik. Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada keuntungan, lembaga pemerintah dirancang untuk menjalankan fungsi nirlaba dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat (Rahmadana et al., 2020). Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan sesuai dengan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Wewenang ini memungkinkan pemerintah daerah mengelola sumber daya secara mandiri, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama pengelolaan keuangan daerah (Ristanti & Handoyo, 2017).

Pada tingkat operasional, penyusunan anggaran menjadi kegiatan penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien (Priskila & Hukum, 2023). Kantor Camat Pangean, yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi, menjadi salah satu contoh instansi yang bertanggung jawab dalam menyusun anggaran sesuai dengan pedoman yang berlaku. Proses penyusunan anggaran di kantor tersebut didasarkan pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), yang merujuk pada dokumen Rencana Strategis SKPD tahun 2020–2022. Dokumen ini menjadi dasar dalam menganalisis program dan kegiatan, disesuaikan dengan isu-isu aktual di tingkat nasional maupun daerah.

Meskipun penyusunan anggaran di Kantor Camat Pangean telah mengikuti pedoman tertentu, terdapat tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah memastikan bahwa seluruh tahapan penyusunan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 (Permendagri, 2020) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan penting: apakah proses penyusunan anggaran di Kantor Camat Pangean selama periode 2020–2022 sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam regulasi tersebut? Pertanyaan ini mendasari perlunya kajian mendalam untuk mengidentifikasi kesenjangan antara praktik yang dilakukan dengan ketentuan normatif.

Studi sebelumnya telah banyak membahas pengelolaan anggaran sektor publik, terutama terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi (Sayuti et al., 2018). Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dalam konteks kantor kecamatan masih terbatas. Selain itu, terdapat kekosongan literatur mengenai evaluasi kinerja anggaran di tingkat kecamatan, khususnya dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian tujuan anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dalam memberikan analisis komprehensif mengenai penyusunan anggaran di Kantor Camat Pangean. Penelitian ini juga menawarkan kontribusi teoretis dan praktis, baik bagi literatur akademik maupun pengelolaan anggaran sektor publik.

Penelitian ini berfokus pada empat aspek utama dalam proses penyusunan anggaran, yaitu: (1) perencanaan, (2) persiapan, (3) penetapan, dan (4) pelaksanaan anggaran. Keempat aspek ini dievaluasi berdasarkan kesesuaiannya dengan pedoman yang tercantum dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan evaluatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana praktik penyusunan anggaran di Kantor Camat Pangean telah memenuhi standar regulasi.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor Camat Pangean dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran. Temuan penelitian juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pemerintah daerah lain dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya literatur terkait pengelolaan keuangan sektor publik, terutama dalam konteks penerapan regulasi di tingkat pemerintah kecamatan.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala utama yang mungkin dihadapi

dalam penyusunan anggaran, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman mengenai regulasi, dan tantangan dalam penyesuaian anggaran dengan kondisi aktual. Melalui analisis ini, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi proses yang telah berjalan, tetapi juga menawarkan rekomendasi strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah melalui pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan efisien. Keberhasilan pengelolaan anggaran di tingkat kecamatan, seperti yang dilakukan oleh Kantor Camat Pangean, pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan data keuangan berupa laporan realisasi anggaran di Kantor Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam menggunakan kalimat penjelasan kualitatif. Penelitian dilakukan melalui metode lapangan, yaitu dengan mengunjungi langsung Kantor Camat Pangean sebagai lokasi utama penelitian.

Populasi penelitian mencakup para pejabat terkait di kantor tersebut, seperti Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pemerintahan, Kasi PMD, Kasi Tramtib, Kasubag Umum, Kasubag Program, dan Kasubag Keuangan. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode sensus, di mana seluruh populasi yang relevan dijadikan sampel penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data deskriptif kualitatif, yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap proses penyusunan dan realisasi anggaran, sedangkan data sekunder meliputi dokumen-dokumen seperti Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Catatan atas Laporan Keuangan, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, wawancara langsung dengan pejabat terkait, termasuk Kepala Kantor dan staf bagian keuangan, untuk mendapatkan informasi mendalam tentang prosedur penyusunan anggaran. Kedua, dokumentasi yang mencakup pengumpulan dan penelaahan dokumen resmi yang relevan. Ketiga, observasi sistematis terhadap fenomena sosial dan teknis dalam proses penyusunan anggaran di lokasi penelitian.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dimulai dengan mengorganisasi data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diikuti dengan eksplorasi kelemahan dan keunggulan dalam proses penyusunan anggaran. Selanjutnya, data tersebut dibandingkan untuk memperoleh temuan yang dapat mendukung penarikan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil akhir dari analisis ini akan disusun dalam bentuk laporan yang menggambarkan proses penyusunan dan realisasi anggaran di Kantor Camat Pangean secara komprehensif.

HASIL

Proses Penyusunan Anggaran Berdasarkan Permendagri

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan di Kantor Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, diketahui bahwa secara keseluruhan proses penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Tahapan utama penyusunan APBD, mulai dari perumusan strategi hingga prioritas pembuatan anggaran, merupakan tanggung jawab kepala daerah. Dalam pelaksanaannya, tugas tersebut didelegasikan kepada perangkat daerah seperti Camat.

Persiapan Anggaran

Persiapan anggaran dimulai dengan mengumpulkan data melalui wawancara, analisis laporan realisasi anggaran sebelumnya, serta evaluasi program dan kegiatan. Data ini digunakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Proses persiapan anggaran di Kantor Camat Pangean berlangsung selama tiga bulan.

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan Kantor Camat Pangean mengungkapkan bahwa penyusunan anggaran tahun berjalan berpedoman pada pencapaian kinerja dan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penyusunan anggaran meliputi efektivitas, efisiensi, dan pemanfaatan sumber keuangan yang ada, baik dari APBD maupun dana desa yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam tahap ini, Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) berperan penting sebagai forum partisipasi masyarakat. Proses dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan, dan akhirnya dibahas di tingkat kabupaten.

Penentuan Anggaran

Tahap penentuan anggaran dilakukan dengan menganalisis kelemahan dan keunggulan dalam proses penyusunan dan pelaporan anggaran. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa semakin tinggi persentase capaian anggaran, tingkat efisiensi dapat cenderung menurun. Namun demikian, secara keseluruhan, realisasi belanja di Kantor Camat Pangean sudah tergolong baik karena mampu menjaga keseimbangan antara capaian dan efisiensi. Selama tiga tahun terakhir, Kantor Camat Pangean menunjukkan kinerja yang efisien dalam pengelolaan anggaran.

Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran di suatu instansi dianalisis berdasarkan hasil realisasi program kegiatan, dan dari wawancara serta pengumpulan data, teridentifikasi bahwa beberapa program belum terlaksana dengan baik. Untuk penyediaan jasa administrasi keuangan, program ini belum diterapkan pada tahun 2020, sementara pada tahun 2021, meskipun diterapkan, tidak ada realisasi anggaran. Namun, pada tahun 2022, beberapa program berhasil terealisasi. Dalam hal penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja, program ini juga tidak dilaksanakan pada tahun 2020 dan diterapkan tanpa realisasi anggaran di tahun 2021. Pada tahun 2022, empat program kegiatan berhasil terealisasi. Penyediaan jasa publikasi perkantoran mengalami nasib serupa; belum diterapkan pada tahun 2020 dan dilaksanakan tanpa realisasi anggaran pada tahun 2021. Di tahun 2022, dua program kegiatan berhasil terealisasi dengan capaian 20%. Pengadaan peralatan gedung/kantor belum dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021, tetapi satu program kegiatan berhasil terealisasi dengan capaian 20% pada tahun 2022. Terakhir, pembinaan dan penilaian desa percontohan sepuluh program pokok PKK tidak diterapkan pada tahun 2020, tetapi pada tahun 2021, sebanyak 120 program kegiatan berhasil terealisasi dengan capaian 20%, dan meningkat menjadi 236 program kegiatan dengan capaian 39% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan anggaran meskipun masih

terdapat kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di masa mendatang.

Berdasarkan evaluasi, pelaksanaan anggaran di Kantor Camat Pangean masih menghadapi tantangan dalam merealisasikan seluruh program yang direncanakan. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan program terus dilakukan, termasuk dengan meningkatkan koordinasi dan perencanaan yang lebih matang.

Proses Penyusunan Anggaran pada Tahun 2020-2022 di Kantor Camat Pangean

Penelitian ini juga menganalisis data dan proses penyusunan anggaran di Kantor Camat Pangean selama periode 2020-2022. Dalam penentuan pedoman perencanaan, Kantor Camat Pangean telah mengikuti langkah-langkah yang diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Strategi penyusunan anggaran ditujukan untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, dengan tetap melibatkan masyarakat melalui Musrenbang pada berbagai tingkatan.

Pada tahap persiapan anggaran, proses dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kemampuan sumber keuangan. Selain itu, evaluasi kinerja dan realisasi anggaran tahun sebelumnya menjadi acuan penting dalam penyusunan anggaran tahun berjalan. Proses ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kecamatan, desa, hingga kabupaten.

Dalam tahap penentuan anggaran, Kantor Camat Pangean melakukan analisis kelemahan dan keunggulan dari pelaksanaan anggaran sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program, realisasi anggaran secara keseluruhan sudah baik. Tingkat efisiensi yang tercapai menunjukkan bahwa anggaran dikelola dengan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

Pelaksanaan anggaran selama periode 2020-2022 menunjukkan adanya progres dalam merealisasikan program-program yang direncanakan. Meskipun beberapa program belum sepenuhnya terlaksana, upaya peningkatan terus dilakukan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan di wilayah Kecamatan Pangean.

Perbandingan Proses Penyusunan Anggaran di Kantor Camat Pangean dengan Permendagri

Tabel 1. Perbandingan Penentuan Pedoman Perencanaan Berdasarkan Permendagri dengan Kantor Camat Pangean

Berdasarkan Permendagri	Berdasarkan Kantor Camat	Sesuai/Tidak Sesuai
a. Setiap SKPD menyusun rencana kerja (Renja) yang merupakan hasil penjabaran dari rencana strategi (Restra)	a. Setiap SKPD menyusun rencana kerja (Renja) yang merupakan hasil penjabaran dari rencana strategi (Restra)	
b. Dalam menyusun rancangan KUA PPAS dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD)	b. Dalam menyusun rancangan KUA PPAS, dibantu oleh tim	Sesuai

- | | |
|--|--|
| <p>c. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS</p> <p>d. Pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dalam hal ini DPPKA menyusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.</p> <p>e. Kepala DPPKA memberitahukan kepada kepala badan agar menyusun DPA-SKPD sedangkan DPPKA menyusun DPA-SKPD dan DPA-SKPD.</p> <p>f. Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Gubernur kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun Anggaran berikutnya.</p> | <p>anggaran pemerintah daerah (TAPD)</p> <p>c. Pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dalam hal ini DPPKA menyusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.</p> |
|--|--|

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 1, secara keseluruhan proses penyusunan APBD di Kantor Camat Pangean sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Tahap perumusan strategi dan prioritas pembuatan APBD pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab kepala Daerah yaitu Gubernur. Namun dalam pelaksanaan APBD wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada perangkat daerah yaitu adalah Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 2. Perbandingan Persiapan Anggaran Berdasarkan Permendagri dengan Kantor Camat Pangean

Berdasarkan Permendagri	Berdasarkan Kantor Camat	Sesuai/Tidak Sesuai
a. Melaksanakan rapat rencana kerja dengan semua devisi, Proses penyusunan anggaran berjalan 3 bulan.	a. melaksanakan rapat rencana kerja dengan semua devisi, Proses penyusunan anggaran berjalan 3 bulan.	Sesuai
b. memperhatikan efektifitas, efesiensi, dan kemampuan sumber keuangan.	b. Memperhatikan realisasi dan pencapaian kinerja anggaran tahun sebelumnya.	
c. Memperhatikan realisasi dan pencapaian kinerja anggaran tahun sebelumnya.		

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 2, Persiapan Anggaran yang diterapkan oleh Kantor Camat Pangean sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan sudah efisien dan diharapkan terus mengalami peningkatan ditahun yang akan datang.

Tabel 3. Perbandingan Penentuan Anggaran Berdasarkan Permendagri dengan Kantor Camat Pangean

Berdasarkan Permendagri	Berdasarkan Kantor Camat	Sesuai/Tidak Sesuai
a. Melihat laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan Melakukan rapat rencana kerja, rapat berupa perundingan mengenai penyusunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan. Setiap komponen anggaran serta pengesahan dan pendiskusian anggaran.	a. Laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya	Sesuai
b. Kelemahan-kelemahan dan keunggulan dalam proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran.	b. Mempelajari kelemahan dan keunggulan dalam proses penyusunan anggaran	
c. Menentukan hasil rapat		

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, bila persentase capaiannya semakin tinggi maka tingkat efisiensinya semakin rendah. Namun secara keseluruhan, realisasi belanja pada Kantor Camat Pangean sudah baik karena persentase capaiannya tidak tinggi dan tingkat efisiannya juga tidak dikatakan rendah. Sehingga bila dilakukan rata-rata maka capaian selama tiga tahun tersebut tergolong efisien.

Tabel 4. Perbandingan Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan Permendagri dengan Kantor Camat Pangean

Berdasarkan Permendagri	Berdasarkan Kantor Camat	Sesuai/Tidak Sesuai
a. Evaluasi dan Analisis Pedoman Anggaran	a. Evaluasi dan Analisis Pedoman Anggaran	Sesuai
b. Merencanakan kegiatan dan program.	b. Merencanakan kegiatan dan program.	
c. Menentukan anggaran dan laporan realisasi anggaran	c. Menentukan anggaran dan laporan realisasi anggaran	
d. Menelaah anggaran dan Mengimplementasikan anggaran		

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Kantor Camat Pangean telah melaksanakan anggaran dengan cukup efisien ditunjukkan dengan capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dalam wawancara realisasi anggaran dinyatakan 90% sampai 95% telah dilaksanakan dengan baik. Kantor Camat Pangean selalu berpedoman pada Visi-Misi bupati Kuantan Singingi dan Kantor Camat Pangean selalu berusaha seefektif mungkin menggunakan anggaran untuk tepat sasaran dan digunakan masyarakat sekecamatan Pangean, Masyarakat menyambut positif kegiatan yang

dijalankan oleh Kantor Camat Pangean. Setiap tahunnya kantor Camat Pangean selalu melaksanakan evaluasi baik dari pengguna anggaran kantor Camat ataupun dari pihak pengawas keuangan yang selalu mengevaluasi dan pengawasan terhadap anggaran yang dilaksanakan pada Kecamatan Pangean.

DISKUSI

Berdasarkan hasil penelitian, proses penyusunan APBD di Kantor Camat Pangean telah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Hal ini mencerminkan adanya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, khususnya terkait peran dan tanggung jawab perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran. Secara teoritis, penyusunan APBD yang efektif harus melibatkan tiga aspek utama, yaitu efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran (Khusaini, 2018). Dalam konteks Kantor Camat Pangean, prinsip-prinsip ini telah diterapkan dengan baik, terutama dalam persiapan dan penentuan anggaran. Pengumpulan data realisasi dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya menjadi landasan untuk menentukan kebutuhan anggaran tahun berjalan, yang sejalan dengan teori perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Persiapan anggaran yang dilakukan selama tiga bulan menunjukkan komitmen terhadap proses perencanaan yang matang. Proses ini melibatkan pertemuan dan diskusi dengan berbagai pihak, seperti Kasubag Program, Sekretaris Camat, dan Bendahara, yang sesuai dengan prinsip kolaborasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa partisipasi berbagai pihak dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan (Anggraini, 2001). Selain itu, pelaksanaan Musrenbang yang melibatkan masyarakat menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dalam memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam penentuan anggaran, Kantor Camat Pangean juga menunjukkan perhatian terhadap aspek efisiensi dan efektivitas. Realisasi belanja yang telah mencapai 90–95% mencerminkan tingkat efisiensi yang cukup baik, meskipun terdapat beberapa program yang belum terlaksana sepenuhnya. Berdasarkan teori efektivitas anggaran, tingkat keberhasilan suatu anggaran tidak hanya diukur dari seberapa besar realisasi anggaran yang dicapai, tetapi juga dari sejauh mana hasilnya dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat (Prasyah & Jannah, 2024) dan . Dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan masyarakat melalui Musrenbang, Kantor Camat Pangean telah menunjukkan upaya untuk menjadikan anggaran lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Namun, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa terdapat tantangan dalam pelaksanaan anggaran, seperti program yang belum terealisasi sepenuhnya dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, penyediaan jasa administrasi keuangan dan pengadaan peralatan kerja belum mencapai target realisasi pada tahun-tahun tertentu. Hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam pengelolaan dan implementasi anggaran yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan sumber daya atau kurangnya koordinasi antar pihak terkait. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Untary & Ardiyanto, 2015) dan (Cipta et al., 2020), yang menyatakan bahwa faktor internal, seperti kapasitas SDM dan sistem pengawasan, sering menjadi kendala utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keterkaitan antara hasil penelitian dan teori juga terlihat dalam evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Camat Pangean. Evaluasi tahunan yang melibatkan pengawas keuangan menunjukkan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan prinsip utama dalam teori pengelolaan keuangan publik. Selain itu, dukungan positif dari masyarakat terhadap program yang dilaksanakan mengindikasikan adanya dampak nyata dari implementasi APBD terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung teori-teori yang ada terkait pengelolaan anggaran daerah, seperti pentingnya perencanaan berbasis kinerja, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan. Namun, untuk mencapai pengelolaan anggaran yang lebih optimal, Kantor Camat Pangean perlu mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi pendukung. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kantor Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi terkait proses penyusunan dan pelaksanaan APBD, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan proses tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dalam penentuan pedoman perencanaan, Kantor Camat Pangean berpedoman pada visi, misi, maksud, dan tujuan organisasi, yang sesuai dengan prinsip-prinsip regulasi yang berlaku. Pada tahap persiapan anggaran, proses ini membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk mempersiapkan rancangan anggaran. Kegiatan tersebut melibatkan rapat rencana kerja yang dihadiri oleh Camat, Sekcam, Bendahara, dan Kasubag Program guna memastikan kesesuaian rencana dengan kebutuhan organisasi.

Dalam penentuan anggaran, Kantor Camat Pangean mendasarkan rencana anggaran pada laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya serta hasil rapat kerja dari berbagai divisi. Proses ini juga melibatkan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dan masyarakat melalui forum Musrenbang, yang berfungsi untuk memastikan kebutuhan masyarakat tercakup dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan anggaran di Kantor Camat Pangean menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, dengan capaian program dan kegiatan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Selain itu, evaluasi rutin yang dilakukan oleh pihak internal maupun pengawas keuangan eksternal membantu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di Kecamatan Pangean. Secara keseluruhan, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran di Kantor Camat Pangean berjalan dengan baik, efektif, dan efisien, meskipun terus memerlukan peningkatan untuk hasil yang lebih optimal.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan kualitas penyusunan dan pelaksanaan APBD di Kantor Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Pertama, meskipun proses penyusunan telah berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam memahami dinamika kebijakan anggaran dan teknik penyusunan anggaran berbasis kinerja. Kedua, dalam tahap persiapan anggaran, durasi tiga bulan yang telah digunakan dapat lebih dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk

mempercepat proses pengumpulan data dan penyusunan dokumen anggaran. Ketiga, partisipasi masyarakat melalui forum Musrenbang perlu ditingkatkan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas masukan, agar rencana program dan kegiatan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, perlu dilakukan inovasi dalam pelaksanaan dan pengawasan anggaran, misalnya melalui penerapan sistem monitoring berbasis digital yang dapat mempermudah evaluasi secara real-time. Kantor Camat juga disarankan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Unit Pelaksanaan Teknis dan pemerintah kabupaten, guna memastikan seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran. Evaluasi secara menyeluruh, baik internal maupun eksternal, harus dilakukan secara konsisten setiap tahun untuk memastikan tingkat efisiensi dan efektivitas tetap terjaga. Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan anggaran di Kantor Camat Pangean dapat semakin baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

REFERENSI

- Anggraini, R. D. (2001). Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. *Sumber*, 21(23), 21–77.
- Cipta, S. D., Ammar, Z., & Andriani, R. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Latar Belakang Individu, Latar Belakang Politik Dan Pemahaman Regulasi Anggota DPRD Terhadap Peran Anggota Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. *JURNAL EKONOMI AL-KHITMAH*, 2(2), 51–64.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Permendagri. (2020). *Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Prasyah, T. S. A., & Jannah, B. S. (2024). ANALISA EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR. *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 12(2), 1–10.
- Priskila, E., & Hukom, A. (2023). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Melalui Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 173–183.
- Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-Angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M., Siagian, V., Nugraha, N. A., Manullang, S. O., & Silalahi, M. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), 115–122.
- Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16–28.
- Untary, N. R., & Ardiyanto, M. D. (2015). *Pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Daerah dengan faktor eksternal sebagai pemoderasi (studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.